

PELAKSANAAN PENULISAN FORMULIR VERIFIKASI DAN KONSEP PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BIDANG PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG JUANDA

Hanifah Maulydia Kartikasari¹, Siti Ning Farida²

^{1,2}Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail: 22042010132@student.upnjatim.ac.id

sitisaham@yahoo.co.id

Abstrak

Program magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi praktis di dunia kerja. Penelitian ini dilakukan selama praktik magang di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda, dengan fokus pada pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses administrasi klaim JKK, khususnya dalam penulisan Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi klaim JKK memerlukan ketelitian dalam memverifikasi kelengkapan dokumen, pencatatan data secara digital, dan pemenuhan standar prosedur administrasi. Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK berfungsi sebagai instrumen kunci dalam memastikan validitas klaim, dengan mencatat informasi penting seperti identitas peserta, rincian kecelakaan, dan jumlah biaya yang diajukan. Proses pencatatan data melalui penggunaan Google Spreadsheet dan situs web internal BPJS Ketenagakerjaan mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data. Kendala yang dihadapi meliputi ketidaklengkapan dokumen dan kesalahan administrasi, yang dapat menghambat proses klaim. Temuan ini menegaskan pentingnya administrasi yang baik dalam mendukung operasional jaminan sosial, serta memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa dalam memahami dinamika pengelolaan klaim JKK.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK, Administrasi

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.812

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

The internship program provides opportunities for students to develop practical competencies in the world of work. This research was conducted during internship practice at BPJS Ketenagakerjaan Juanda Branch Office, focusing on the management of Work Accident Insurance (JKK). The purpose of this research is to understand the JKK claim administration process, especially in writing the Verification Form and JKK Determination Concept. The research used a qualitative approach, where data was collected through observation, interviews, and document analysis. The results showed that the administrative management of JKK claims requires accuracy in verifying the completeness of documents, recording data digitally, and fulfilling standard administrative procedures. The JKK Verification and Determination Concept Form serves as a key instrument in ensuring the validity of claims, by recording important information such as participant identity, accident details, and the amount of costs submitted. The process of recording data using Google Spreadsheet and BPJS Ketenagakerjaan's internal website supports efficiency and transparency in data management. Obstacles encountered include incomplete documents and administrative errors, which can hinder the claims process. These findings emphasize the importance of good administration in supporting social security operations, and provide practical insights for students in understanding the dynamics of JKK claims management.

Keywords : *BPJS Ketengakerjaan, Work Accident Insurance, Verification Form and JKK Determination Concept, Administration*

PENDAHULUAN

Praktik magang merupakan salah satu program yang dirancang untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan. Dalam era globalisasi dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki pemahaman teori yang kuat, tetapi juga kemampuan praktis untuk beradaptasi di lingkungan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Seiring dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten, program magang menjadi salah satu cara strategis untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional, memahami dinamika organisasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah di lapangan. Program ini menjadi salah satu strategi penting untuk mempersiapkan individu agar kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Program magang tidak hanya memberikan pemahaman praktis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan wawasan mengenai proses kerja, manajemen waktu, serta etos kerja yang dibutuhkan untuk menjadi profesional yang handal. Melalui magang, mahasiswa dapat mengeksplorasi bidang keahlian yang sesuai dengan minat mereka sambil memahami tantangan dan solusi dalam dunia kerja nyata.

BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan bertugas memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja melalui berbagai program, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Program-program ini dirancang untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh pekerja selama menjalankan aktivitas kerja. Di antara program tersebut, JKK menjadi salah satu prioritas utama, mengingat tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yang sering kali berdampak pada produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan beban sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan JKK secara efektif menjadi fokus utama BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja terlindungi secara optimal.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang disingkat dengan sebutan JKK adalah program unggulan BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Pentingnya program ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan kerja yang dilaporkan setiap tahun. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda, jumlah kasus kecelakaan kerja di wilayah Surabaya dan sekitarnya mencapai ribuan kasus setiap tahunnya, mulai dari kecelakaan ringan hingga yang fatal, seperti cacat permanen atau kematian. Tingginya angka ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih efektif untuk memastikan hak pekerja terlindungi, serta meminimalkan dampak negatif yang timbul dari kecelakaan kerja baik bagi pekerja maupun keluarganya.

Melalui praktik magang di BPJS Ketenagakerjaan, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendalami proses pengelolaan JKK secara langsung. Topik Pelaksanaan Penulisan Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK memberikan wawasan yang mendalam tentang prosedur administrasi dalam pengajuan klaim. Dalam praktiknya, mahasiswa terlibat dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen, penginputan data, serta identifikasi kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta. Pengalaman ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga memperkenalkan mahasiswa pada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan klaim JKK, seperti ketidaklengkapan dokumen atau kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pembayaran klaim.

Pengalaman langsung dalam pelaksanaan penulisan formulir verifikasi dan konsep penetapan JKK memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi praktis di bidang administrasi dan jaminan sosial. Proses verifikasi dokumen, pencatatan data secara digital, serta penggunaan sistem informasi internal BPJS Ketenagakerjaan membantu mahasiswa memahami bagaimana sebuah organisasi besar mengelola data dengan efisien dan transparan. Selain itu, mahasiswa juga belajar pentingnya memastikan akurasi dan validitas data untuk mendukung kelancaran proses klaim. Dengan pengetahuan dan pengalaman ini, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan teknis, berpikir kritis, dan menyusun solusi yang relevan, sehingga lebih siap untuk memasuki dunia kerja profesional setelah menyelesaikan studi.

METODE

Dalam artikel ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik. Metode ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara alami, tanpa adanya manipulasi pada situasi dan kondisi, serta berlangsung dalam keadaan normal. Penelitian ini menekankan deskripsi yang bersifat alami, di mana penulis

terlibat langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan secara langsung selama kegiatan magang selama empat bulan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam setiap tahap dalam proses pengajuan klaim JKK, mulai dari pelaporan kecelakaan kerja, verifikasi dokumen yang mencakup penulisan formulir verifikasi dan konsep penetapan JKK, penerimaan tagihan, hingga pencairan klaim.

Selama kegiatan praktik magang, penulis mengamati secara langsung aktivitas sehari-hari, interaksi antar karyawan, penggunaan alat serta dokumen pendukung, dan memahami alur pengerjaan melalui tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan dokumen tersebut. Melalui wawancara dengan karyawan dibidang pelayanan, penulis menggali informasi yang lebih mendalam terkait proses pengajuan klaim JKK serta menanyakan tentang langkah-langkah penyelesaian dari berbagai kendala yang dihadapi. Analisis dokumen dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen relevan yang digunakan selama praktik magang, seperti kuitansi tagihan, laporan kecelakaan tahap 1, 2, dan 3, identitas diri, absensi, berita kecelakaan, serta dokumen pendukung lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Administrasi Perkantoran

Dalam Lumingkewas dan Supit (2023), definisi administrasi perkantoran menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Pandangan Harry L. Wylie dalam bukunya *Office Organization and Management*, administrasi perkantoran merupakan aktivitas yang berfokus pada pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya manusia, metode kerja, serta perangkat atau mesin yang digunakan dalam proses operasional kantor. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah mencapai hasil terbaik yang memiliki kualitas tinggi. Selain itu, hasil tersebut harus diraih dalam waktu yang singkat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Pendekatan ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya agar mampu memenuhi harapan organisasi. Definisi ini mencerminkan bahwa administrasi perkantoran tidak hanya berorientasi pada tugas-tugas rutin, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

George R. Terry, dalam bukunya *Office Management and Control (Fourth Edition)*, mendefinisikan administrasi perkantoran sebagai sebuah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas kantor. Selain itu, administrasi perkantoran juga mencakup fungsi pengarahan kepada individu yang terlibat dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan kata lain, administrasi perkantoran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi perkantoran sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif.

WH Evans memberikan pandangan yang lebih luas mengenai administrasi perkantoran dengan menyebutnya sebagai sebuah fungsi yang terkait dengan pengelolaan dan pengarahan seluruh tahapan operasional perusahaan. Fungsi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengolahan data, komunikasi, dan pengelolaan memori organisasi. Dalam konteks ini, administrasi perkantoran tidak hanya berfungsi untuk mendukung operasional sehari-hari,

tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan informasi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Pemahaman ini menyoroti pentingnya administrasi perkantoran sebagai fondasi yang mendukung integrasi berbagai fungsi organisasi.

Selain itu, Ulbert, dalam karya Safrawali dan Siregar (2022), mengungkapkan bahwa administrasi perkantoran dapat dilihat dalam pengertian yang lebih sempit sebagai proses pengorganisasian dan pencatatan data serta informasi secara terstruktur. Data dan informasi ini dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi, dan proses pencatatannya dilakukan untuk menyediakan keterangan yang jelas dan memudahkan pengambilan data, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ulbert juga mengaitkan konsep ini dengan istilah Tata Usaha, yang berfokus pada tugas pencatatan administratif yang bersifat rinci dan sistematis. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan data sebagai elemen utama dalam administrasi perkantoran.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi perkantoran adalah fungsi yang berhubungan erat dengan manajemen organisasi. Aktivitas ini melibatkan berbagai proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Administrasi perkantoran mencakup beragam aktivitas, mulai dari pengolahan data, komunikasi, hingga pengelolaan memori organisasi. Fokus utama dari fungsi ini adalah untuk menghasilkan output berkualitas tinggi dalam waktu yang optimal, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian integral dari operasional perusahaan, administrasi perkantoran memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan efisiensi. Administrasi yang baik memastikan bahwa sumber daya manusia, teknologi, dan metode kerja dapat digunakan secara optimal untuk mendukung operasional perusahaan. Selain itu, administrasi perkantoran juga membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Dengan demikian, administrasi perkantoran tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga sebagai penggerak utama yang memastikan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan strategisnya.

Dalam era digital saat ini, administrasi perkantoran telah berkembang menjadi lebih kompleks dan berbasis teknologi. Penggunaan perangkat lunak manajemen data, otomatisasi proses, dan sistem komunikasi digital telah menggantikan banyak tugas manual yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Transformasi ini memungkinkan administrasi perkantoran menjadi lebih efisien dan akurat dalam mengelola data serta informasi. Namun, perubahan ini juga menuntut sumber daya manusia yang terlibat untuk memiliki keterampilan digital yang memadai agar dapat mengoperasikan teknologi tersebut secara efektif.

Administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan organisasi. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, kejelasan dalam komunikasi, dan akurasi dalam pencatatan data merupakan faktor kunci yang mendukung keberhasilan berbagai fungsi organisasi. Selain itu, administrasi yang efektif juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penguatan administrasi perkantoran menjadi salah satu prioritas dalam mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan.

Jaminan Sosial

Menurut Sofyan dan Gusman (2023), International Labour Organization (ILO), salah satu badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendefinisikan jaminan sosial sebagai sistem perlindungan yang disediakan oleh masyarakat bagi warganya. Sistem ini dirancang untuk membantu individu dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi dan sosial yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan secara signifikan. Penekanan utama pada jaminan sosial adalah memastikan bahwa warga negara memiliki perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan mereka, baik secara individu maupun kolektif. ILO Convention No. 102 memberikan definisi lebih rinci mengenai jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggotanya melalui kebijakan publik. Perlindungan ini bertujuan untuk mengatasi tekanan ekonomi dan sosial yang muncul akibat hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan. Risiko-risiko tersebut meliputi penyakit, kehamilan, persalinan, kecelakaan kerja, kecacatan, pengangguran, usia lanjut, pensiun, serta kematian dini dari pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain itu, jaminan sosial juga mencakup pemberian santunan kepada anggota keluarga, termasuk anak-anak, sebagai bagian dari perlindungan komprehensif.

Sistem jaminan sosial memainkan peran strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial yang tidak terduga. Dengan adanya sistem ini, individu yang kehilangan pendapatan karena faktor-faktor seperti kecelakaan kerja atau usia lanjut tetap memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Tanpa jaminan sosial, risiko sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat meningkat secara signifikan. Beberapa negara menerapkan mekanisme uji kebutuhan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Uji kebutuhan ini bertujuan memisahkan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan mereka yang mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya, sehingga program jaminan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling rentan di masyarakat.

Dengan berbagai mekanisme yang diterapkan, jaminan sosial menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memastikan setiap warga negara dapat hidup secara layak. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan kesejahteraan sosial melalui perlindungan terhadap berbagai kondisi, seperti kemiskinan, kecacatan, usia lanjut, dan pengangguran. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat yang rentan terhadap risiko-risiko tersebut dapat terhindar dari dampak buruk yang lebih besar.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Definisi atau pengertian program JKK diatur dalam peraturan pelaksanaan UU SJSN, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 yang berbunyi "*Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.*"

Pada masa persiapan Rancangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (RUU SJSN), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) telah dijelaskan dalam Naskah Akademis (NA) RUU SJSN tahun 2004. NA tersebut menggambarkan Program JKK sebagai program yang

bertujuan memberikan jaminan berupa pelayanan dan santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju, selama menjalankan, atau setelah menyelesaikan tugas pekerjaan, termasuk penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pelaksanaan Program JKK berlandaskan pada filosofi kecelakaan kerja sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 paragraf ketiga. Filosofi ini menyatakan bahwa kecelakaan kerja merupakan risiko yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, karena pengusaha memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerjanya. Risiko kecelakaan yang terjadi selama menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab profesional pemberi kerja (*resque professional*). Oleh karena itu, pekerja yang tidak dapat bekerja akibat kecelakaan kerja harus tetap dijamin untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana sebelum kecelakaan terjadi.

Dengan merujuk pada berbagai pasal dalam Undang-Undang SJSN yang mengatur program jaminan sosial, manfaat, tujuan, tata laksana, serta filosofi kecelakaan kerja, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dapat dirumuskan sebagai program jaminan sosial yang memberikan perlindungan berupa pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis serta santunan tunai kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat pekerjaan. Program ini diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, di mana pembiayaan dilakukan melalui pembayaran iuran berkala oleh pekerja atau iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi merupakan inti dari berbagai proses organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Salah satu aspek penting dari administrasi dalam konteks jaminan sosial adalah pengelolaan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tahapan awal sebelum proses penulisan Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK merupakan pengajuan dokumen laporan kecelakaan kerja yang disampaikan oleh rumah sakit atau klinik yang berafiliasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam tahap ini, prinsip administrasi, seperti pengorganisasian dan pencatatan dokumen, menjadi sangat penting untuk memastikan semua dokumen terkelola dengan baik. Proses ini mencerminkan peran penting administrasi perkantoran dalam mendukung operasional sistem jaminan sosial. Setelah dokumen diterima, langkah pertama adalah menyusun dokumen laporan kecelakaan kerja sesuai dengan kategori tertentu yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah pemberian Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK pada dokumen tersebut.

Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk memvalidasi data yang diajukan oleh pemberi kerja terkait dengan klaim kecelakaan kerja. Formulir ini merupakan instrumen administrasi yang krusial dalam memastikan validitas klaim JKK. Dokumen ini tidak hanya digunakan untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administratif tetapi juga untuk mencatat informasi penting, seperti identitas peserta, rincian kecelakaan, dan jumlah biaya yang diajukan, sekaligus memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sebelum dokumen diproses lebih lanjut. Dalam konteks jaminan sosial, formulir ini berfungsi sebagai penghubung antara peserta, pemberi kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, formulir ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses klaim. Hal ini sejalan

dengan tujuan jaminan sosial, yaitu memberikan perlindungan yang adil dan merata kepada peserta dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Administrasi yang baik adalah kunci dalam memastikan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemberi kerja, meliputi formulir Laporan Kasus Tahap 1 (KK1), Laporan Kasus Tahap 2 (KK2), Laporan Kasus Tahap 3 (KK3), salinan KTP atau SIM, salinan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, salinan absensi, dan berita acara yang ditandatangani oleh dua orang saksi. Apabila terdapat salah satu dokumen tidak lengkap, maka proses pengajuan akan tertunda hingga kelengkapan dokumen dipenuhi. Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi kelengkapan dokumen, tetapi juga mencatat informasi penting seperti nama peserta, nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan, nama perusahaan tempat peserta bekerja, tanggal dan waktu kecelakaan, lokasi kejadian, serta jumlah biaya yang diajukan oleh fasilitas kesehatan terkait. Setiap dokumen ini memiliki peran spesifik dalam memberikan bukti administratif yang valid mengenai kecelakaan kerja yang dialami peserta. Dalam konteks jaminan kecelakaan kerja, administrasi yang efisien membantu meminimalkan penundaan dalam pemrosesan klaim, sehingga peserta dapat segera mendapatkan hak mereka. Kegagalan dalam melengkapi dokumen dapat memperpanjang proses pengajuan klaim dan memengaruhi efisiensi sistem jaminan sosial secara keseluruhan.

Proses penginputan data ke dalam laporan piutang JKK 2024 menggunakan media Google Spreadsheet mencerminkan upaya modernisasi administrasi di BPJS Ketenagakerjaan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pencatatan data, tetapi juga memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Penginputan data ini menjadi bagian penting dalam administrasi untuk memastikan setiap tagihan tercatat dengan baik, baik yang telah dibayarkan maupun yang masih menunggu proses pembayaran. Dengan arsip digital, setiap transaksi dapat dilacak dengan mudah, memudahkan proses audit, dan mendukung akuntabilitas sistem. Digitalisasi ini mencerminkan transformasi administrasi tradisional menuju pengelolaan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta jaminan sosial.

Tahap penginputan tagihan ke website Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) merupakan langkah penting lainnya dalam administrasi JKK. Proses ini melibatkan pemisahan dokumen berdasarkan jenis laporan, yaitu Laporan Kasus Tahap 1 (KK-1) untuk pengajuan awal dan Laporan Kasus Tahap 3 (KK-3) untuk pengobatan lanjutan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, administrasi klaim dapat dilakukan secara sistematis dan efisien. Proses ini mencerminkan peran teknologi dalam mendukung administrasi modern, yang tidak hanya meningkatkan kecepatan pemrosesan tetapi juga memastikan keakuratan data.

Administrasi memainkan peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem jaminan sosial, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja. Setiap tahapan dalam proses administrasi, mulai dari penerimaan dokumen hingga pembayaran klaim, dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada peserta. Dalam hal ini, administrasi bukan hanya fungsi pendukung, tetapi juga elemen inti yang memastikan jaminan sosial dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Administrasi yang efektif tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada peserta melalui penyelesaian klaim yang cepat dan akurat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial. Dengan proses yang terorganisasi dan transparan, peserta dapat merasa yakin bahwa hak mereka terlindungi, sementara BPJS Ketenagakerjaan dapat mengelola program

dengan efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan program jaminan sosial dalam menghadapi tantangan di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan sistem jaminan sosial, khususnya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik yang diterapkan memungkinkan penulis untuk mengamati dan memahami secara mendalam setiap tahapan dalam proses pengajuan klaim JKK. Melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen, ditemukan bahwa administrasi yang baik berperan strategis dalam memastikan kelancaran operasional, akurasi data, dan kepatuhan terhadap prosedur.

Administrasi perkantoran mencakup berbagai fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pencatatan, dan pengawasan aktivitas, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi pengelolaan sumber daya organisasi. Dalam konteks jaminan sosial, administrasi menjadi elemen inti yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam proses pengelolaan klaim, termasuk melalui instrumen penting seperti Formulir Verifikasi dan Konsep Penetapan JKK. Proses administrasi yang terstruktur dan terintegrasi dengan teknologi, seperti penggunaan Google Spreadsheet dan website Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), menunjukkan upaya modernisasi dalam pengelolaan klaim JKK. Transformasi digital ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keakuratan dalam pencatatan dan pengolahan data, yang pada akhirnya memberikan manfaat langsung bagi peserta jaminan sosial.

Program JKK, sebagai salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional, berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Administrasi yang efektif mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan yang optimal kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan. Selain itu, administrasi yang efisien juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial dan berkontribusi pada keberlanjutan program dalam menghadapi tantangan di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa administrasi yang baik tidak hanya menjadi fungsi pendukung, tetapi juga menjadi elemen strategis yang memastikan pelaksanaan jaminan sosial berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan peserta. Hal ini menjadikan administrasi perkantoran sebagai salah satu faktor kunci dalam kesuksesan operasional organisasi dan sistem jaminan sosial secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, O. (2024). Implementasi Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 Hal 163-169.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2024. Dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>. Diakses pada 30 November 2024.
- Luminkewas, E., & Supit, B. (2023). *Pengantar Administrasi Perkantoran*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

- Putri, E. A. (2020). *Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Safrawali, & Siregar, B. (2022). Penerapan Administrasi Bisnis dan Administrasi Perkantoran Modern di Kota Medan. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 2 No. 2 Hal 364-375.
- Sihombing, I., & Ritonga, F. (2024). Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3 No. 3 Hal 322-327.
- Sofyan, Y., & Gusman, D. (2023). Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia. *Journal of Swara Justisia*, Vol. 1 No. 1 Hal 208-2019.
- Wekke, I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.